



GURINDAM KEPRI

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Raja Isa Batam Centre, Batam 29432 Telp. (0778) 4685575 Fax. (0778) 468580

Pemda se-Provinsi Kepri Serahkan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2017

Batam – Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 (LKPD TA 2017) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Pasal 297, Pemda berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rangkaian acara penyerahan LKPD dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2018 yang diawali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Didampingi oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala BPKAD Kepulauan Riau, Nurdin menyerahkan Laporan Keuangan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono di Ruang Rapat Lantai III Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

"Laporan Keuangan yang kami serahkan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kepri. Sebagaimana kita tahu pada masa-masa sekarang ini,

sudah menjadi tuntutan masyarakat bahwa pelaksanaan keuangan negara harus diupayakan benar-benar *clean and clear*." demikian ujar Nurdin dalam sambutannya. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Perwakilan memberikan apresiasi dan penghargannya kepada Pemda se-Kepulauan Riau, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang berkomitmen menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK Kepri secara tepat waktu.

Oleh karena itu, lanjut Joko Agus, BPK Kepri juga berkomitmen akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah LKPD diserahkan.

Selanjutnya, masih pada hari yang sama, ganti Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyerahkan laporan keuangannya. Berturut-turut pada hari berikutnya, giliran Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Kota Batam yang menyerahkan laporan keuangannya. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang secara bergantian menyerahkan laporan keuangan BPK Kepri untuk diperiksa.



BPK Kepri Gelar Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar



kasus aktual yang berkaitan dengan pemeriksaan sebagai materi utama. Kemudian dalam sesi lainnya juga dibahas mengenai perbandingan antara temuan-temuan pemeriksaan LKPD berbasis kas menuju akrual dengan temuan-temuan pemeriksaan LKPD berbasis akrual. Selain itu materi berkaitan dengan resiko dan materialitas pemeriksaan juga menjadi pokok pembahasan dalam diklat tersebut. Di akhir diklat, Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, menyampaikan beberapa harapannya terkait penyelenggaraan diklat di BPK Kepri kali ini. Yang paling penting, menurut Joko Agus, Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar kali ini harus dapat secara nyata menambah tingkat kompetensi dan profesionalitas para pemeriksa di BPK Kepri dalam menjalankan tugas pemeriksaan LKPD di masa yang akan datang.

Batam – Menjelang akan dilakukannya pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Diklat PKN BPK RI menyelenggarakan kegiatan Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akruar. Acara yang diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa di BPK Kepri tersebut diselenggarakan selama lima hari, yaitu dari tanggal 26 Februari s.d. 2 Maret 2018 dan bertempat di Ruang Auditorium Lt.5 Gedung BPK Kepri.

Diklat yang diampu oleh Hadiyati Munawaroh, Kepala Sub Auditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, tersebut banyak mengangkat contoh-contoh



BPK Merajut Kebersamaan



Batam - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-71 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan dan perlombaan yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan secara simbolis dibuka oleh Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, pada Jumat, 12 Januari 2018 di halaman lobi gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Joko Agus menyampaikan bahwa acara-acara perlombaan semacam ini penting dan relevan untuk dilakukan. Terlebih lagi, tema HUT BPK RI tahun ini adalah "Merajut Kebersamaan". Diharapkan dengan sarana perlombaan dan



pertandingan semacam ini, kebersamaan dan kekompakan diantara seluruh keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat terajut dan terjalin lebih erat. Bahkan tidak hanya diantara para pegawai sendiri tetapi juga antara pegawai dengan anggota keluarga BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, termasuk para petugas kebersihan. Rangkaian kegiatan perlombaan dalam rangka menyemarakkan HUT Ke-71 BPK RI Tahun 2017 diawali dengan kegiatan senam sehat bersama yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu acara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang meriah, unik, menghibur, dan kompetitif. Perlombaan tersebut antara lain, pertandingan beregu membawa balon, pertandingan beregu lompat tali, lomba merias wajah, lomba beregu makan pisang, dan lomba beregu memasak nasi goreng dan mie goreng.

BPK Kepri Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol dari APBD TA 2017



Batam – Bertempat di Ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, menyerahkan secara simbolis, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.

Acara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 April 2018 tersebut, digelar dalam rangka memenuhi amanat Pasal 34A Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas LPJ penerimaan dan pengeluaran Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa. Pemeriksaan *on desk* atas LPJ Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri telah selesai dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa di lingkungan BPK Kepri pada tanggal 16 Maret 2018.

Dalam sambutannya, Joko Agus menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) sasaran utama pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. **Pertama**, BPK akan melihat kesesuaian antara nomor rekening parpol penerima dengan yang tercantum dalam dokumen pencairan dana oleh pemerintah daerah. **Kedua**, BPK juga akan melihat kesesuaian antara jumlah bantuan keuangan yang dilaporkan oleh Parpol di LPJ dengan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah. **Ketiga**, BPK akan memastikan bahwa setiap parpol telah melengkapi LPJ yang dibuatnya dengan bukti-bukti pengeluaran keuangan yang lengkap dan sah. Dan yang **keempat**, BPK akan melihat substansi belanja yang dilakukan oleh setiap parpol penerima. Apakah sudah tepat sesuai peruntukannya atau belum. Dari situ BPK akan dapat memastikan bahwa porsi peruntukan bantuan keuangan sebesar minimal 60% yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik telah terpenuhi atau belum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kepri terhadap 71 LPJ yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Partai Politik penerima bantuan keuangan di 8 wilayah Provinsi Kepulauan Riau kepada BPK Kepri, Tim Pemeriksa BPK Kepri menyimpulkan bahwa terdapat **11,27%** LHP yang dinilai **Telah Sesuai Kriteria**. Sedangkan **56,34%** LHP dianggap **Tidak Sesuai dengan Kriteria** dan **29,58%** LHP dinyatakan **Sesuai Kriteria dengan Pengecualian**. Sedangkan sisanya yaitu **2,82%** LHP, Tim Pemeriksa BPK Kepri memutuskan **Tidak dapat Menyatakan Kesimpulan**.

"Kami sangat mengharapkan agar hasil pemeriksaan BPK terhadap LPJ Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD se-Provinsi Kepulauan Riau ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kita semua. Khususnya bagi para pengurus partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang diterima dari APBD pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan kepada partai-partai politik di wilayahnya masing-masing.." demikian pungkas Joko Agus dalam sambutannya.

Selain dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Daerah, acara penyerahan LHP atas LPJ Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pengurus Partai-partai Politik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. (why)



GALERI



71 Tahun BPK Merajut Kebersamaan



Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau



Acara Penyerahan LHP LPJ Banparpol Tahun Anggaran 2017



Lomba Senam Memperingati HUT BPK ke-71



Upacara Bendera Memperingati HUT BPK ke-71



Lomba Ketangkasan Memperingati HUT BPK ke-71